



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1333/2024
TENTANG

PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1095/2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, perlu ditambahkan anggota panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi yang diatur sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antarkementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1095/2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1333/2024
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGELOLAAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN KESEHATAN

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- IV. Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- V. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- VI. Wakil Ketua III : Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan, Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- VII. Sekretaris I : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- VIII. Sekretaris II : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- IX. Sekretaris III : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- X. Anggota : 1. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M. (Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet)
2. Sofyan Apendi, S.H., M.H. (Kepala Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Sekretariat Kabinet)

3. Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si (Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
4. Imam Pasli, S.STP, M.Si. (Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
5. Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K. (Asisten Deputy Ketahanan Gizi dan Promosi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
6. dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid. (Asisten Deputy Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
7. dr. Nia reviani, MAPS (Asisten Deputy Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
8. Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.H, (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia)
9. Dr. Roberia, S.H.,M.H, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia)
10. Dr. Ganda Surya Satya Johni Arifin putra, S.H., M.H., M.Kn (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
11. Dr. Noer aziza (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
12. Rizi Umi Utami (Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial)
13. Ani Wuryandari (Analisis SDM Aparatur Ahli Madya, Kementerian Sosial)

14. Yulia Astusi, S.T., M.S.E (Sekretaris Direktorat Jenderal industri Agro, Kementerian Perindustrian)
15. Merrijantij Punguan Pintaria, S.T., M.Eng. (Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian)
16. Kris Sasono Ngudi Wibowo, S.T., M.M. (Sekretaris Direktorat Jenderal Industri kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian)
17. Emmy Suryandari, S.T., M.T.M. (Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian)
18. Ikana Yossye Ardianingsih, S.H., M.Si (Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian)
19. F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A (Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan)
20. Amalia Katris Hardini, S.H., M.H (Kepala Bagian Peraturan transportasi Udara, Multimoda dan Penunjang, Kementerian Perhubungan)
21. Lisa Septiana, S.H., M.H (Ketua Tim Peraturan Transportasi Multimoda, Kementerian Perhubungan)
22. Bertiana Sari, S.H., MBA (Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika)
23. Ir. I Nyoman Adhiarna, M.Eng, Ph.D (Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika)
24. Indra Maulana, S.H.,LL.M (Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika)
25. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum (Kepala Biro Hukum dan KLN, Kementerian Agama)
26. H. Saan, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Agama)

27. Sri Hariyati, S.H, M.M (Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan)
28. Ivan Fithriyanto, S.T., M.S.E (Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga, Kementerian Perdagangan)
29. Satriana Sagita Wardhani, S.H.,M.Hum (Analisis Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan)
30. Harmoko, S.Si., M.T (Penjamin Mutu Produk Ahli Madya, Kementerian Perdagangan)
31. Astika Tresnawati, S.Si., M.S.E., MA (Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, Kementerian Perdagangan)
32. Raden Dwi Tiara Lestari, S.H., M.I.L (Analisis Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan)
33. Purwono Nugroho, S.TP., M.Si (Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan)
34. Yunus Sirundu, S.E., M.Si (Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan)
35. Edward Halomoan P, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan)
36. Deviani Parawitasari, S.H (Analisis Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan)
37. Fitria Wiraswati, S.H., M.H (Analisis Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan)
38. Mardiyana Listyowati, S.H., M. SE (Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan)
39. Arif Sulisty, S.Kom., M. Kom (Direktur Impor, Kementerian Perdagangan)
40. Wiliater Leonardo, S.E., M.E (Analisis Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan)

41. Priyo Tri Atmojo, S.E., M.M (Analisis Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan)
42. Novita Sari, S.E., M.M (Analisis Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan)
43. Mardi Parnowiyoto, SH, MH (Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
44. Ir. Anang Muchlis, Sp. PSDA. (Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
45. Ir. Tanozisochoi Lase, M.Sc (Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
46. Ary Prasetyo, SH, M.Hum (Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
47. Chandra RP. Situmorang, ST, MT (Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
48. Dr. Ringgy Masuin, ST, MT (Ketua Tim Keterpaduan Perencanaan Perumahan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
49. Maria Handayani Setyaningrum, ST, MT (Ketua Tim Penyusunan NSPK dan Serah Terima Aset, Direktorat Rumah Khusus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
50. Suminarti, ST, MT (Ketua Tim Penyusun Program dan Anggaran Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

51. Abdurrahman, ST (Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Rumah Susun, Ditjen Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
52. Plt. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
53. Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan)
54. Sunardi Manampiar Sinaga (Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan)
55. Surya Lukita Warman (Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan)
56. Yuli Adiratna (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan)
57. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan)
58. Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan)
59. Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan)
60. Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm. (Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan)
61. Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm. (Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan)

62. Dra. Dwiana Andayani, Apt (Direktur Standardisasi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan)
63. Ineke Indraswati (Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
64. Sri Suning Kusumawardani (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
65. Didik Kusnaini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan)
66. Putut Hari Satyaka (Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan)
67. Nanik Murwati, S.E., M.A (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
68. Dr. R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP., M.Si (Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
69. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
70. Direktur sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri
71. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri
72. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri
73. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri
74. Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu
75. Lalu Syaifudin, SH, MH (Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

76. Drs. H. Luthfy Latief, MSi (Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
77. Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian
78. Ketua Tim Kerja Harmonisasi dan Sinkronisasi Kementerian Pertanian
79. Reni Mursidiyanti (Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan)
80. Sunardi Manampiar Sinaga (Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan)
81. Yuli Adiratna (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan)
82. Muhamad Idham (Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan)
83. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan)
84. Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, M.Si (Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
85. Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum (Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
86. Margareth Robin Korwa, S.H., M.H (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
87. Bertiana Sari, SH, MBA (Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
88. Ir. I Nyoman Adhiarna, M. Eng, Ph.D (Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika)

89. Indra Maulana (Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
90. Dr. Drh. NLP Indi Dharmayanti, MSi (Kepala Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional)
91. Mila Kencana, SIP., MA (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Badan Riset dan Inovasi Nasional)
92. Hadi Wahyuningrum, SH, MM (Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
93. Kismorowati (Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi, BPJS Kesehatan)
94. Ari Dwi Aryani (Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan)
95. Beno Herman (Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan)
96. Dr. Asih Eka Putri, MPPM (Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional)
97. Mickael Bobby Hoelman, S.E., M.Si (Anggota Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional)
98. Perwakilan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi
99. Perwakilan Sekretariat Negara
100. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
101. Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
102. Perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga
103. Perwakilan Tentara Nasional Indonesia
104. Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia
105. Perwakilan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

- 106. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
- 107. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- 108. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- 109. Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- XI. Sekretariat :
- 1. Tim Kerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 2. Tim Kerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 3. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 4. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003